

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan kian lama bertambah kompleks, mulai dari kurangnya kualitas sumber daya masyarakat, banyaknya pengangguran hingga kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Permasalahan selanjutnya dari Desa Karangjati adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut dikarenakan jenjang pendidikan yang rendah. Sebagian besar penduduk hanyalah lulusan jenjang sekolah dasar, menengah, hingga atas, sangat minim lulusan dengan tingkat sarjana keatas. Laporan statistik penduduk berdasarkan pendidikan Desa Karangjati yang telah diperbarui tahun 2019 mencatat dari jumlah penduduk 11.042 terdapat, 2.215 orang yang tidak/belum sekolah, 1.724 orang tidak tamat SD/ sederajat, 1.767 orang tamat SD/ sederajat, 1.675 orang SLTP/ sederajat, 2.948 orang SLTA/ sederajat, 17 orang Dimploma I/III, 107 penduduk S.Muda, 563 penduduk Diploma IV/ Strata I, 25 orang Strata II, dan 1 orang Strata III.

Dari perihal tersebut timbul sebuah masalah baru yaitu pengangguran, pengangguran ini memiliki dua jenis di Desa Karangjati, pertama pengangguran dikarenakan pensiunan dan yang kedua pengangguran aktif dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan. Yang menjadi permasalahan utama adalah pengangguran aktif atau yang dalam masa produktif namun tidak mendapatkan pekerjaan, karena di usia

yang produktif namun tidak mendapatkan pekerjaan maka kesejahteraan masyarakat pun menjadi kurang. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka pengangguran di masyarakat desa bisa menjadi berkurang.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa yaitu melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan.¹ Salah satunya di Desa Karangjati yang melaksanakan kewirausahaan desa yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan ekonomi desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengelolah potensi yang sebelumnya diberikan sebagai kompensasi/penghasilan kepada Kepala Desa beserta perangkatnya atas jabatannya. Karena terjadi polemik bagi berlangsungnya Pemerintah Desa di Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Desa dianggap menghapus kewenangan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) untuk menggarap tanah bengkok sebagai kompensasi atas jabatannya. Penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Program Pemberdayaan masyarakat dan peningkatkan jaminan sosial masyarakat desa sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana

¹. Anggraeni, M.R. (2016). *PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA*. MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016.

diinginkan.² Di Desa Karangjati pun sudah sejak lama melaksanakan pemberdayaan masyarakat mulai sejak sebelum berdirinya BUMDes, namun pelaksanaan tersebut belum maksimal berjalan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya turut berperan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan Letak desa yang bisa dinilai cukup strategi yang berada di jalur utama Malang-Surabaya, maka terdapat banyak sekali potensi atau sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai bentuk wirausaha, seperti sumber mata air yang bersih dan melimpah yang dijadikan usaha isi ulang air bersih, tanah desa yang kosong dan dikelola menjadi lahan parkir truk angkutan, kerajinan seni batik khas Desa Karangjati, dan *café Omah Pring*. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 11.042 jiwa yang terdiri dari, penduduk yang belum/tidak bekerja sebanyak 2511 jiwa, jumlah tersebut tentu mencapai angka yang cukup besar.³

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1), Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan atau

² Rita Mutiarni, S. Z. (2018). *Pendamping Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milih Desa (BUMDes) Putra Subagyo Desa Miagan – Jombang*. COMVICE, Vol 2 NO 1, April 2018.

³ Laporan Statistik Umum penduduk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Yang diperbarui pada tanggal 18 Februari 2019.

disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa maka semakin besar pula peluang BUMDES untuk mengelolanya.⁴

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa.⁵ Tujuan dari pendirian BUMDES sendiri adalah untuk meningkatkan PADes, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat. BUMDes di Desa Karangjati ini bernama BUMDes “*Kujati Perdana*”. Nama tersebut merupakan singkatan dari *Kegiatan Usaha Jaringan Amanah dan Tempat Investasi untuk Perberdayaan Ekonomi Rakyat Desa Asli Nan Abadi*. BUMDes Kujati Perdana ini didirikan pada tanggal 11 September 2017 yang dikelola langsung oleh masyarakat dan Pemerintah Desa yang pengelolaannya terpisah dengan kegiatan Pemerintah Desa.

BUMDes *Kujati Perdana* juga memiliki visi terwujudnya BUMDesa *Kujati Perdana* sebagai sentra Perekonomian Desa untuk kesejahteraan masyarakat mandiri dan berbudaya.⁶ Artinya, Pemerintah Desa Karangjati ingin menjadi desa yang mandiri dengan hasil dari unit-unit usaha yang dikelola oleh desa. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga diperlukan dalam pengelolaan BUMDes. Begitu juga dengan BUMDes *Kujati Perdana*, Ketua lembaga ini *Kujati Perdana* mengatakan bahwa hanya masyarakat yang bertempat tinggal di desa Karangjati saja yang boleh mengelola BUMDes.

⁴ Republik Indonesia. (2004). *Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

⁵ <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>. diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 12.34

⁶ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kujati Pedana. Pasal 6

Tabel 1.1. Jenis Usaha dan Omset Per Desember 2018

No	Jenis Usaha	Pendapatan
1	Isi Ulang Air Bersih	Rp.99. 942.500,00
2	Jasa Parkir Truk Angkutan	Rp.343.600.737,00
3	Kerajinan Seni Batik Khas Desa Karangjati	Masih Swadaya
4	Café Oma Pring	Rp10.932.600,00
Total		Rp.521.720.099,00

Sumber : Dikelolah oleh peneliti yang didapat dari BUMDes Karangjati.

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis-jenis usaha sudah bisa dikatakan berhasil, karena sejak berdirinya BUMDes Karangjati pada tanggal 11 September 2017 tidak langsung mengelola jenis usaha, pengelolaan mulai seluruhnya mulai dilakukan pada bulan Oktober 2018. Selama 3 bulan berjalan pendapatan yang dilakukan sudah mencapai target bahkan meliebihi yang ditentukan. Keberhasilan ini disebabkan oleh pemberdayaan masyarakat yang saling bekerja sama dengan baik, demi tercapaikan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

Dalam AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) milik Desa Karangjati pada pasal 24 tentang pembagian hasil usaha bahwa hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Alokasi pembagian hasil usaha setiap tahun bersamaan dengan LPJ dengan realisasi disetorkan ke PADes

sebesar 30%, pemupukan modal sebesar 15%, kesejahteraan penasehat dan pelaksana operasional sebesar 15%, cadangan modal sebesar 15%, peningkatan kapasitas pengurus sebesar 10%, untuk dana sosial sebesar 10%, insentif Badan Pengawas sebesar 5%.⁷

Jika berbicara kondisi masyarakat Desa Karangjati bisa dibilang cukup konsumtif, hal ini disebabkan karena letak desa yang cukup strategi, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan masih terdapat penduduk belum/tidak bekerja sebanyak 2511 jiwa, makanya itu menjadi tugas yang berat bagi pemerintah Desa Karangjati. Dari situ pendirian BUMDes menjadi salah satu alternatif agar pemerintah Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat desa diajak untuk sama-sama belajar bersama aktor perubahan untuk memetakan potensinya dan meningkatkan kegiatan produksinya. Salah satu kegiatannya dapat berupa pengembangan inovasi hasil produksi. Dengan mengedepankan pada pemberdayaan masyarakat diharapkan sedikit demi sedikit kemiskinan di desa karangjati dapat dikurangi dan kesenjangan antara desa dan kota dapat dipersempit.⁸

Saat ini pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat diseluruh Indonesia terutama di Desa Karangjati, yang mana kegiatan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa agar tercapainya suatu kesejahteraan. Masyarakat setempat sebagai pelaku utama dari kegiatan kewirausahaan memiliki peran yang

⁷ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kujati Pedana. Pasal 24

⁸ Sutomo, M. M. (2018). *Mewujudkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Desa Kalipucang, Jatiarjo Dan Wonosari Kabupaten Pasuruan*. Volume 1 No. 1 Mei 2018.

cukup penting dalam penyelesaian persoalan yang ada, melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi yang ada dan mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.⁹

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaran urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁰ Peran Pemerintah Desa juga sangat penting dalam pendirian BUMDes yaitu sebagai penasehat dan pengawas. Di Desa Karangjati, kepala Desa berperan sebagai penasehat pelaksanaan BUMDes, dan beberapa perangkat desa berperan sebagai pengawas pelaksanaan BUMDes. Peran dari pemerintah Desa sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan tercapainya target omest dari BUMDes yang sudah penulis jelaskan ditabel sebelumnya. Hal ini sudah membuktikan bahwa kondisi pemerintah Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga memberikan hasil yang maksimal pula.

Bila dilihat dari pentingnya mendirikan BUMDes selain untuk meningkatkan ekonomi desa, pendapatan asli desa, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat adalah menggunakan aset desa berupa tanah bengkok yang di kelola menjadi suatu potensi yang bisa dipetik pendapatannya. Selain itu, pendirian

⁹ Arina Parumista, E. N. (2017). *Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo*. Jurnal Pariwisata Terapan, No. 2, Vol. 1, 2017.

¹⁰ Valentine Queen Chintary, A. W. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

BUMDes adalah suatu program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna untuk tercapainya pembangunan nasional. Selain itu, saat ini nama desa yang terlihat di masyarakat adalah suatu daerah yang tertinggal dari peradaban ibukota, maka tidak heran jika banyak pemerintah desa di daerah lain berganti menjadi kelurahan agar dipandang lebih maju dari desa, hal ini lah yang menjadi penyebab mengapa BUMDes harus didirikan, selain untuk menambah pendapat asli desa BUMDes dapat mempertahankan nama Desa yang di anggap tertinggal menjadi lebih maju dan mandiri.

Adapun batasan dari penelitian ini akan berfokus pada pengelolaan BUMDes *Kujati Perdana* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dari pengelolaan unit-unit usaha tersebut semakin meningkat setiap tahunnya sehingga tercapainya visi dan misi dari BUMDes dan tercapainya alokasi dana yang telah dicantumkan sesuai dengan AD dan ART. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi permasalahan penting yang membutuhkan penanganan dari Pemerintah Desa.

1.2 Rumusah Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, adapun masalah pokok yang akan dikaji oleh peneliti mengenai kesejahteraan masyarakat Desa Karangjati adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ‘Kujati Perdana’ ?
2. Bagaimana Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ‘Kujati Perdana’ ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dirumuskan dalam sebuah ruang lingkup kegiatan yang akan diangkat dari ini suatu permasalahan yang sudah ditentukan . maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ‘Kujati Perdana’.
2. Untuk mengetahui hambatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ‘Kujati Perdana’.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran atau konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes.
- c. Memberikan sumbangan penelitian dalam memperkaya wawasan konsep dalam praktek pekerjaan social terutama dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes

1.3.2 Manfaat Praktis

- a. **Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, terutama Pemerintah Desa Karangjati khususnya bagi Badan Usaha Miliki Desa Kujati Perdana dalam memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes menjadi hal yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes kepada akademisi khususnya mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang yang akan melakukan penelitian atau memberikan kajian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes. Penelitian ini merupakan ssebagai salah satu syarakat untuk mendapatkan gelar strata satu dalam program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu sebagai pengetahuan kepada masyarakat dalam pengelolaah BUMDes. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memaksimalkan proses pengolahan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini merupakan kembangan konsep secara umum yang berisiuraian mengenai beberapa istilah atau konsep yang dimuat dalam penelitian.

Adapun beberapa konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mc. Ardle yang dikutip oleh Harry Hikmat yaitu sebagai proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya. Hal itu dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun pengertian yang dikemukakan oleh Mc. Ardle bukan bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan semata, namun lebih mementingkan makna sebuah proses dalam pengambilan keputusan sebagai langkah untuk mencapai tujuan.¹¹

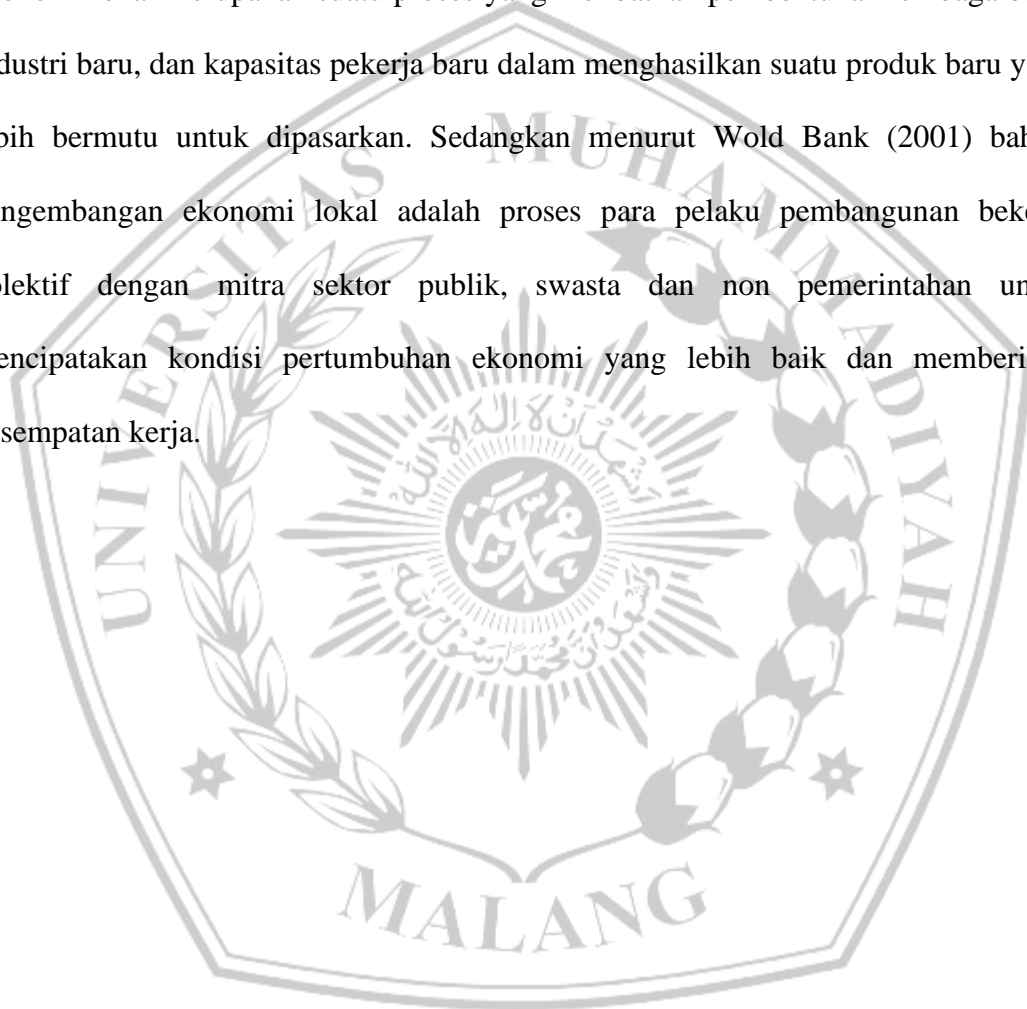
b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.

c. Pengembangan Ekonomi Desa/ Lokal

¹¹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hal. 3

Menurut Blakely dan Bradshaw, pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk saling mendorong, merangsang, memelihara suatu aktivitas usaha untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses yang melibatkan pembentukan lembaga baru, industri baru, dan kapasitas pekerja baru dalam menghasilkan suatu produk baru yang lebih bermutu untuk dipasarkan. Sedangkan menurut World Bank (2001) bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah proses para pelaku pembangunan bekerja kolektif dengan mitra sektor publik, swasta dan non pemerintahan untuk menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memberikan kesempatan kerja.



Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “ Perdana” Desa Karangjati Kabupaten Pasuruan.



Dasar Hukum

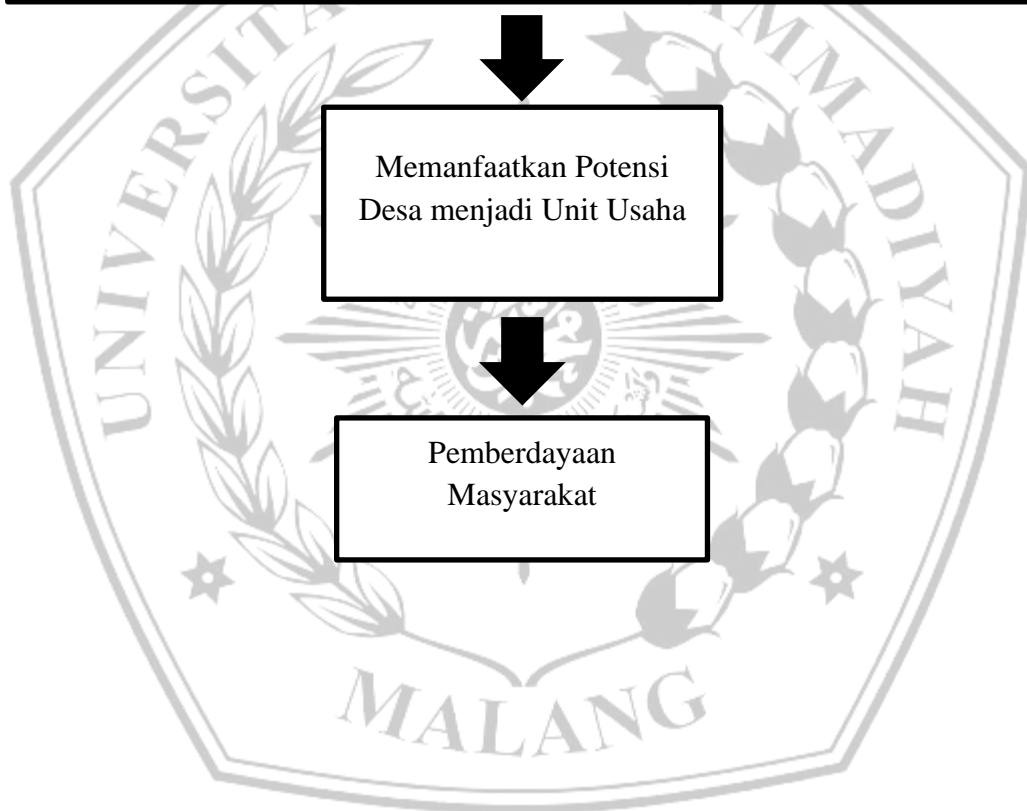
- Undang – undang No.6 tahun 2014 tentang desa
- Permendes PDDT No.4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa



Memfaatkan Potensi Desa menjadi Unit Usaha



Pemberdayaan Masyarakat



1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan merupakan suatu konsep yang berisikan indikator-indikator yang mampu menunjukan suatu konsep yang dimaksudkan sehingga dapat mengoperasionalkan masalah-masalah yang ada dilapangan, diantaranya seperti, pemetaan masalah, mencari alternatif solusi, peningkatan profesionalisme pengurus, penguatan modal, perluasan pasar, pengembangan jejaring bahan baku, dan pemasaran, pengembangan kontrol kualitas, menjaga substaining produksi. Adapun variabel yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini :

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kujati Perdana.

a. Aspek Tata Kelola

1. Perencanaan pengembangan BUMDes
2. Pengorganisasian program pengembangan BUMDes
3. Pelaksanaan Program BUMDes
4. Pengawasan program BUMDes

b. Jaminan Kualitas Produk

1. Branding produk
2. Variasi dan Inovasi produk

c. Optimalisasi Manfaat BUMDes bagi Pemberdayaan Masyarakat

1. Sosialisasi program BUMDes kepada masyarakat
2. Pemanfaatan potensi desa

3. Pelibatan Masyarakat dalam aktivitas produksi dan pemasaran

2. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kujati Perdana.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,2007 : 15)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap data dan informasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kujati Perdana. Penelitian ini tidak diarahkan pada kesimpulan salah-benar, tidak menguji suatu hipotesis diterima-ditolak, tetapi lebih ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan secara mendalam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdapat 2 macam yaitu, data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Data primer

Dalam Penelitian data primer digunakan sebagai bukti konkrit dari data-data yang diambil ketika wawancara dengan narasumber dan observasi turun lapang langsung ke lokasi penelitian yang berada di kantor Badan Usaha Milik Desa “*Kujati Perdana*” mengenai pemberdayaan Masyarakat atau penghambat dari proses

Pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, lokasi berikut yang akan di ambil mengenai penelitian pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Kemudian sumber terakhir adalah masyarakat setempat yang mampu memberikan informasi mengenai manfaat yang didapat dari pengelolaan BUMDes.

b. Data Sekunder

Data berikutnya yang akan peneliti gunakan adalah data sekunder, dimana data ini hanya menjadi data tambahan yang mana data ini didata didapat dari buku, jurnal, atau internet mengenai pengelolaan BUMDes guna memperkuat tulisan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan dalam memahami dari subyek penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi antara peneliti dengan narasumber yang mampu memberikan informasi mengenai topik yang dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi ini dilakukan dalam penelitian guna mendapatkan data atau informasi mengenai kajian penelitian, dimana peneliti dapat melakukan pencatan data-data resmi yang didapat dari hasil penelitian.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian merupakan sasaran peneliti yang dipilih guna mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan desa. Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan subyek peneliti, yang dianggap mampu memberikan informasi dan data yang akurat seperti :

1. Pelaksana Operasional BUMDes “*Kujati Perdana*” Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Karena peneliti mendapat informasi berupa data yang butuhkan.
2. Masyarakat Sekitar Desa Karangjati, karena Pemberdayaan ini ditujukan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan BUMDes

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu berada di Kantor Badan Usaha Milik Desa Karangjati yang berada di Jl. By Pass Karangjati Pandaan, dan Kantor Desa Karangjati yang terletak di Jl. Pahlawan Tawi No. 1 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Model ini merupakan strategi analisis yang umum dan mengandung prioritas tentang apa yang dianalisis dan mengapa. Ada beberapa bagian yang harus di kaji dalam model interaktif menurut Miles dan Huberman (2012 : 15-19), yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kujati Perdana dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi Data

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:338), perlunya pencacatan yang teliti dalam memperoleh data dengan jumlah yang cukup banyak. Karena semakin lama peneliti turun ke lapangan maka semakin banyak, kompleks, rumit data yang didapat maka data yang didapat harus segera dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal – hal pokok, memfokuskan kajian, tema, dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi menjadi lebih jelas, terarah dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

c. Display Data

Penyajian data yang merupakan hasil dari mereduksi data yang didapat, kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif, bagan, atau tabel. Dalam penyajian data tersebut maka data yang tersaji menjadi terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga lebih mudah. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiono (2016:341) penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel/bagan, atau hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dengan display data maka akan mempermudah dalam melakukan pemahaman terhadap apa yang dicari.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan paling akhir dari data yang diambil dari sebuah penelitian. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiono (2016:337) penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memaknai keteraturan, pola-pola sebab akibat atau proporsi. Seperti pendapat yang telah dikemukakan Milles dan Huberman bahwa penarikat tidak bisa hanya dilakukan sekali dalam menganalisis data, melainkan perlu adanya interaksi bolak balik dalam kegiatan mereduksi data. Maka dalam tahapan ini penarikan kesimpulan berisi penjelasan akhir dari pemecahan masalah secara rinci, jelas dan singkat.